



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Tahun 2019-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA TAHUN 2019-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.

lm

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Kota, Pemerintah Kota dan pengusaha.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota yang selanjutnya disebut RIPPAR-KOTA adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kepariwisataan Kota untuk periode 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
12. Destinasi Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kota.
13. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan Pariwisata dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya, dan buatan.
14. Kawasan Strategis Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

1/11

15. Perwilayahan Pembangunan DPK adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPK dan KSPK.
16. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan Kepariwisata.
23. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

lm

24. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
25. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
26. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Kota meliputi :
 - a. Pembangunan DPK;
 - b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kota;
 - c. Pembangunan Industri Pariwisata Kota; dan
 - d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Kota.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAN-KOTA.
- (3) RIPPAN-KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. prinsip Pembangunan Kepariwisataan;
 - b. visi Pembangunan Kepariwisataan;
 - c. misi Pembangunan Kepariwisataan;

- d. tujuan Pembangunan Kepariwisataan;
- e. sasaran Pembangunan Kepariwisataan;
- f. kebijakan dan strategi Pembangunan Kepariwisataan, yang meliputi:
 - 1). Pembangunan DPK;
 - 2). Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kota;
 - 3). Pembangunan Industri Pariwisata Kota; dan
 - 4). Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RIPPAR-KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
INDIKASI PROGRAM
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA

Pasal 3

- (1) Rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kota dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menangani urusan kepariwisataan sebagai penanggung jawab didukung oleh instansi terkait, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Kota.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan RIPPAR-KOTA.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPAR-KOTA; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisataan yang mencakup Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan RIPPAR-KOTA bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

lm

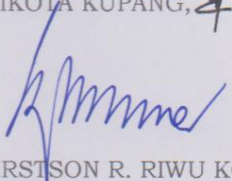
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

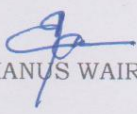
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Juli 2019
WALIKOTA KUPANG, 4


JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Juli 2019

u Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


ELVIANUS WAIRATA

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 4



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA
TAHUN 2019-2025

I. UMUM

Secara filosofis, pembangunan kepariwisataan memerlukan perencanaan induk, yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan. Untuk itu maka penyelenggaraan kepariwisataan perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang.

Dari aspek sosiologis, paradigma pembangunan kepariwisataan yang bertumpu semata-mata pada aspek ekonomis sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada keserasian antara manfaat ekonomi dengan keseimbangan lingkungan, sosial dan budaya. Paradigma baru memandang kepariwisataan sebagai salah satu sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dengan tidak mengorbankan aspek lingkungan yang bersifat eksploitatif.

Dari aspek yuridis, Pemerintah Kota Kupang belum memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pembangunan Kepariwisata, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota (RIPPAR-KOTA) merupakan pedoman utama pembangunan Kepariwisata Kota yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program-program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Pembangunan Kepariwisata.

1/4

RIPPAR-KOTA seperti juga RIPPARNAS mempunyai Lingkup Pembangunan Kepariwisataan yaitu Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata. Dengan adanya Peraturan Daerah ini Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Kupang.

RIPPAR-KOTA menjadi sangat penting, karena memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

RIPPAR-KOTA juga diperlukan sebagai acuan operasional Pembangunan Pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan Pembangunan Kepariwisataan Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 284

lu

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA
TAHUN 2019-2025

PRINSIP, VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA

1. PRINSIP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

- a. Pembangunan Kepariwisata bertanggung jawab dan berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, sosial dan budaya.
- b. Pembangunan Kepariwisata berbasis masyarakat.
- c. Pembangunan kepariwisataan yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan masyarakat.
- d. Pembangunan Kepariwisata yang komprehensif, terpadu antar sektor maupun antar pemangku kepentingan.

2. VISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Terwujudnya Kota Kupang yang Layak Huni , Cerdas, Mandiri, Sejahtera dengan Tata Kelola Bebas KKN.

3. MISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan local yang menarik, aman, nyaman, kreatif dan inovatif, mampu menggerakkan peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisata nusantara dan mancanegara.
3. Meningkatkan industry pariwisata yang berdaya asing , kredibel , menggerakkan kemitraan usaha , dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Mengembangkan kelembagaan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka penguatan keseimbangan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

lm

4. TUJUAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata.
- b. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.
- c. Mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
- d. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mengangkat perekonomian lokal yang berkelanjutan serta keberpihakan pada industri kecil dan menengah dan juga meningkatkan kualitas SDM Pariwisata.
- e. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

5. SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

- a. Peningkatan rata-rata lama tinggal Wisatawan dan pergerakan Wisatawan.
- b. Menjaring Wisatawan yang berkualitas sebagai segmen pasarpotensial.
- c. Peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor Pariwisata.
- d. Peningkatan jumlah pengeluaran Wisatawan.
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat yang sadar wisata.
- f. Peningkatan produk domestik regional bruto dan pendapatan per kapita masyarakat serta pengurangan kemiskinan
- g. Mengembangkan ekonomi kreatif.

6. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

A. Pembangunan DPK

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan DPK meliputi:

a. Perwilayahan Pembangunan DPK

Perwilayahan Pembangunan DPK terdiri dari:

1). 6 (enam) DPK

2). 6 (enam) KSPK yang tersebar di 6 (enam) DPK:

KSPK KELAPA LIMA

- Pantai Nunsui Oesapa

- Kawasan Hutan Mangrove Oesapa Barat
- Pantai Paradiso Oesapa Barat
- Pantai Kelapa Lima
- Pantai Pasir Panjang
- Meriam Jepang Kelapa Lima
- Patung Kirap Remaja
- Taman Nostagia
- Kuliner Taman Nostalgia
- Kuliner Oesapa Pantai Warna Oesapa

KSPK KOTA LAMA

- Pantai Ketapang 1 Tode kisar
- Pantai Koepan LLBK
- Pantung Sobe Sonbai III
- Gereja Katedral
- Gereja Kota Kupang
- Pura Hindu Fatubesi
- Taman Kalpataru Fatubesi
- Klenteng Kupang LLBK
- Tugu Pancasila LLBK
- Kuliner LLBK Pantai Koepan
- Kuliner Pasar Malam Kampung Solor
- Kuliner Oeba Kota Lama

KSPK KOTA RAJA

- Mata Air Bakunase
- Bunker Jepang Bakunase
- Rumah Raja Kupang Naikoten I
- Kuburan Raja Nisnoni
- Penjara Lama Fontein
- Mesjid Raya Fontein
- Patung HKSN Naikoten I
- Museum Eltari Fontein
- Kolam Air Nona
- Bendungan Biknoi
- Kolam Renang Wirasakti

lm

KSPK WILAYAH OEBOBO

- Kantor Gubernur
- Kantor BI
- Rumah Jabatan Gubernur
- Trans Mart
- Mall Ramayana
- Lippo Plaza
- Patung Eltari
- Bungker Jepang Liliba
- Gua Lourdess Oetete
- Museum NTT Kayu Putih
- Pusat Kuliner Fourt Corner Mall Ramayana
- Pusat Kuliner Oepoi
- Kuliner Jalan Eltari Jagung Bakar
- Suba Suka Mall I Oetete
- Suba Suka Mall II Fatululi

KSPK WILAYAH ALAK

- Gua Monyet Alak
- Pantai Kelapa I Alak
- Cekdam Naioni
- Cekdam Manutapen
- Kolam Pancing Air Sagu Batuplat
- Mata Air Bakunase
- Kuburan Raja Taebenu Manutapen
- Benteng Concordia Fatufeto
- Kuburan Belanda Nunhila
- Kuburan Batukadera
- Pantai Batu Kepala Nunhila
- Batu Panjang Naioni
- Mata Air Tabun Manulai I
- Pantai Namosain Pelabuhan Rakyat
- Pantai Nunbaun Sabu
- Pantai Nunhila
- Pantai Imperial Namosain

W

b. Menyusun rencana tata bangunan dan tata lingkungan pembangunan DPK dan KSPK.

2). Penegakan regulasi pembangunan DPK dan KSPK

Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan DPK dan KSPK yaitu melakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Kota terhadap penerapan rencana detail pembangunan DPK dan KSPK.

3). Pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK.

Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK yaitu melakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha dan masyarakat.

b. Pembangunan DTW

Pembangunan DTW meliputi:

1). DTW alam

- Pantai Nunsui di Kelurahan Oesapa
- Pantai Pasir Panjang dan pantai Kelapa Lima di kelurahan Pasir Panjang dan kelurahan Kelapa Lima;
- Pantai Namosain dan pantai Tanjung Bululutung di Kelurahan Namosain
- Taman Wisata Alam Teluk Kupang di pesisir Kota Kupang;
- Kawasan Goa Monyet Tenau di Kelurahan Alak;
- Kawasan Goa Monyet Sasando di Kelurahan Kelapa Lima;
- Kawasan wisata penelitian Taman Hutan Kali Kupang di Kelurahan Fatukoa
- Kawasan wisata perkemahan Hutan Bumi Perkemahan Pramuka Manutapen di kelurahan Manutapen dan kelurahan Batuplat.

2) DTW budaya

- Kawasan Wisata Bendungan Kolhua di Kelurahan Kolhua;
- Kawasan Wisata Bendung Biknoi di Kelurahan Fontein dan Naikolan;
- Kawasan pusat perbelanjaan modern di Kelurahan Oebufu;
- Taman Rekreasi Subasuka di Kelurahan Kelapa Lima;

3). DTW hasil buatan manusia

- Taman Nostalgia;
- Kampung tenun Alor;
- Kampung Tenun Sabu;
- Taman Bank Indonesia;
- Taman Sasando.

Arah kebijakan pembangunan DTW adalah :

1. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kspk dan pengembangan kota
2. pembangunan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan serta memperluas segmen pasar
3. pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
4. pelaksanaan revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan KSPK.

Strategi untuk perintisan dan Pengembangan DTW meliputi:

- a. mengembangkan DTW baru yang potensial di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang
- b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.

Strategi untuk Pembangunan DTW meliputi:

- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK
- b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.

Strategi untuk pemantapan DTW meliputi:

- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait

la

- b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.

Strategi untuk revitalisasi DTW meliputi:

- a. melakukan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW dan kawasan di sekitarnya.
- c. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata
- Arah kebijakan pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi:
- a. pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK
 - b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK
 - c. pengendalian Prasarana Umum, pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Strategi untuk pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;
- b. meningkatkan fasilitas Pemerintah Kota untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta;

- c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPK.

Strategi untuk peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Kota dan swasta
- b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan Kepariwisata; dan
- c. mendorong penerapan Prasarana Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.

Strategi untuk pengendalian Prasarana Umum, pembangunan Fasilitas Umum dan fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan
- b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

d. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Arah Kebijakan pembangunan Aksesibilitas Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan jaringan informasi

Strategi pengembangan jaringan informasi dengan kriteria:

- 1) mempunyai daya jangkauan yang luas
- 2) muatan materi yang lengkap
- 3) terhubung dengan berbagai penyedia layanan pariwisata lain.

- b. pengembangan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas

Pengembangan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dengan kriteria sesuai dengan standar teknis bagi penyandang disabilitas.

- c. pengembangan transportasi pariwisata.

Pengembangan transportasi pariwisata meliputi :

- 1) pengembangan moda transportasi

- 2) pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi
- 3) pengembangan sistem transportasi.

e. Pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata meliputi :

- a. peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas
pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas ditetapkan dengan kriteria:
 - 1) komunitas melakukan gerakan yang dapat mendorong
 - 2) kemajuan Kepariwisata
 - 3) adanya potensi masyarakat
- b. peningkatan industri ekonomi kreatif masyarakat
peningkatan industri ekonomi kreatif masyarakat ditetapkan dengan kriteria:
 - 1) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - 2) memanfaatkan secara optimal potensi lokal yang ada di masyarakat.
- c. peningkatan kapasitas dan kesadaran Wisata masyarakat
peningkatan Kapasitas dan kesadaran Wisata ditetapkan dengan kriteria:
 - 1) kemampuan beradaptasi dan atau memanfaatkan peluang dalam sektor pariwisata
 - 2) kegiatan aktif masyarakat untuk turut berkontribusi dalam Kepariwisata
 - 3) pemahaman dan penerapan nilai sapta pesona oleh masyarakat.
- d. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan Kepariwisata.
Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan Kepariwisata ditetapkan dengan kriteria:
 - 1) pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang *ke* pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata

- 2) peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.

Strategi untuk pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan keberadaan komunitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata
- b. menguatkan peran komunitas masyarakat dalam pengembangan pariwisata
- c. meningkatkan ketrampilan masyarakat
- d. meningkatkan produk layanan industri ekonomi masyarakat di bidang pariwisata
- e. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan industri ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal
- f. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan nilai Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat
- g. meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air.

f. Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi peningkatan:

- 1) kemudahan investasi di bidang pariwisata
- 2) promosi investasi di bidang pariwisata.

Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata meliputi kegiatan pelaksanaan:

- 1) debirokratisasi investasi di bidang pariwisata
- 2) deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata, meliputi kegiatan:

- 1) menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata

- 2) meningkatkan promosi investasi pariwisata di dalam negeri dan luar negeri
- 3) meningkatkan sinergi promosi investasi pariwisata dengan sektor terkait.

B. Pemasaran Pariwisata Kota

Pembangunan pemasaran pariwisata kota meliputi:

1. pengembangan pasar wisatawan

Arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, pasar berkembang, dan pasar baru
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh destinasi pariwisata
- f. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan, insentif, konvensi dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

2. pengembangan citra pariwisata

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata sebagai destinasi pariwisata yang berbasis keunggulan lokal, indah, aman, nyaman dan berdaya saing.

Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata daerah, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:

- a. pemosisian citra pariwisata Daerah di antara para pesaing
Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata di antara para pesaing didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun internasional.
- b. pemosisian citra pariwisata destinasi.
Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.

Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

3. Pengembangan kemitraan pariwisata

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kerjasama antar pelaku pemasaran yang strategis, terpadu, sinergis dan berkelanjutan dan saling menguntungkan.

Strategi untuk mengembangkan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis berkelanjutan, meliputi meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, provinsi dan Daerah;
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.

12

4. Pengembangan promosi pariwisata

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata kota di dalam negeri;
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata kota di luar negeri.

Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata kota di dalam negeri meliputi:

- a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri
- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi.

Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata kota di luar negeri meliputi :

- a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata kota di luar negeri;
- b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata kota di luar negeri, dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata kota di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata kota yang berada di luar negeri.

C. Industri Pariwisata Kota

1. Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata kota meliputi:

- a. peningkatan kualitas Industri Pariwisata;
- b. penguatan regulasi untuk pengembangan industri pariwisata;
- c. penguatan sistem industri pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan industri pariwisata.

2. Strategi pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. penyusunan skema regulasi untuk industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing industri pariwisata;
- c. peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam industri di kawasan pariwisata;
- d. penciptaan iklim industri yang kondusif;

- e. memfasilitasi pengembangan industri pariwisata;
- f. peningkatan industri pariwisata berkelanjutan;
- g. pengembangan paket pariwisata untuk mendukung pola pergerakan Wisatawan yang lebih merata dan menguntungkan;
- h. pengembangan pola kerjasama industri lintas sektor; dan
- i. pengembangan pola kerjasama untuk keadaan darurat.

D. Kelembagaan Kepariwisataan Kota

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan meliputi:

a. penguatan organisasi Kepariwisataan

Arah kebijakan penguatan organisasi Kepariwisataan, meliputi:

- 1) reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah.
- 2) peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah dan nasional.
- 3) pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata.
- 4) pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.
- 5) pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.

Strategi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi meliputi:

- a. meningkatkan dan menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan Kepariwisataan.
- b. meningkatkan dan menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi baik secara internal Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi maupun lintas sektor.

Strategi peningkatan dan pemantapan peran organisasi Kepariwisataan, meliputi :

- a. meningkatkan dan menguatkan fungsi strategis Kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah;

- b. meningkatkan dan mengembangkan industri pariwisata;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. meningkatkan pelestarian lingkungan.

Strategi pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. meningkatkan dan menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di pemerintah kota;
- b. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah secara sinergis dan berkelanjutan.

Strategi pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata meliputi:

- a. mengembangkan dan menguatkan organisasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kota Kupang;
- b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan Kepariwisataan daerah.

Strategi pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata, meliputi:

- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi dalam pengembangan destinasi di pemerintah provinsi untuk mencapai Kepariwisataan berkelanjutan; dan
- b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan Kepariwisataan daerah untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan Kepariwisataan.

b. Pembangunan SDM pariwisata

Pembangunan SDM Pariwisata, meliputi:

- 1. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di pemerintah kota
Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah Kota Kupang yang berbasis pada budaya birokrasi.

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah Kota Kupang meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara di bidang Kepariwisataan
- b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM pariwisata pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang Kepariwisataan.

2. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia industri dan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia industri dan masyarakat, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat.

Strategi pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia industri dan masyarakat meliputi:

- a. meningkatkan profesionalisme SDM pariwisata di bidang Kepariwisataan melalui standarisasi industri pariwisata, KPPK kompetensi tenaga kerja, dan pemahaman tentang Kepariwisataan Kota Kupang
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata.

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata meliputi:

- 1) meningkatkan penelitian untuk pengembangan DTW.
- 2) meningkatkan penelitian untuk pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPK.

- 3) meningkatkan penelitian untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPK.
- 4) meningkatkan penelitian untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata.
- 5) meningkatkan penelitian untuk pengembangan investasi di bidang Kepariwisata.

b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata meliputi:

- 1) meningkatkan penelitian pasar Wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan keragaman produk
- 2) meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatancitra pariwisata;
- 3) meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- 4) meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan kegiatan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri.

c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata meliputi:

- 1) meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan struktur industri pariwisata
- 2) meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata
- 3) meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usahapariwisata
- 4) meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

km

- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan.

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan meliputi:

- 1) meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasiKepariwisataan
- 2) meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

WALIKOTA KUPANG, 4

u JEFIRSTSON R. RIWU KORE 9

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA
TAHUN 2019-2025

RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA
TAHUN 2019 - 2025

- Bagian - A : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA
KOTA
Bagian - B : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN
PARIWISATA
KOTA
Bagian - C : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA
KOTA
Bagian - D : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN
PARIWISATA KOTA

Bagian - A

**INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KOTA
LINGKUP PEMBANGUNAN DPK**

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DPK
2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA
3. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM DAN
FASILITAS PARIWISATA
4. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA
5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN
6. PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

1/2

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DPK

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DPK DAN KSPK

ARAH KEBIJAKAN 2 :-PENEGAKAN REGULASI PEMBANGUNAN DPK DAN
KSPK

ARAH KEBIJAKAN 3 : PENGENDALIAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN
DPK DAN KSPK

INDIKASI PROGRAM Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM 2019-2025	PENANGGUNG JAWAB
1	Indikasi Program Perencanaan Pembangunan DPK dan KSPK	Dinas Pariwisata Kota Kupang Yang Membidangi Destinasi
	a. Pantai Nunsui – Oesapa b. Kawasan Ekowisata Mangrove Oesapa Barat c. Kawasan Nunhila – NBD – Namosain d. Kawasan Gua Monyet Alak e. Pantai LLBK dan Tode Kiser f. Kawasan Kelapa Lima dan Pasir Panjang g. Kawasan Gua Jepang Kelurahan Liliba, Penfui Naimata h. Pentaan kawasan bendung Biknoe, Kelurahan Naikolan	
2.	Indikasi Program Penegakan Regulasi Pembangunan DPK dan KSPK	
	a. Penyusunan Regulasi tata bangunan dan tata lingkungan daya tarik wisata prioritas b. Monitoring dan Pengawasan Implementasi Regulasi Rencana ditail pembangunan c. Monitoring dan Pengawasan Implementasi, Regulasi tata bangunan dan tata lingkungan	

	daya tarik wisata prioritas	
3.	Indikasi Program Pengendalian Implementasi Pembangunan DPP dan KSPP	
	Peningkatana Koordinasi antara Pemerintah, Pelaku industri, Masyarakat dan Inplementasi Rencana Pembangunan DPP dan KSPP	

ls

2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PERINTISAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA DALAM RANGKA MENDORONG PERTUMBUHAN KSPK DAN PENGEMBANGAN KOTA;
- ARAH KEBIJAKAN 2 : PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING PRODUK DALAM MENARIK MINAT DAN LOYALITAS WISATAWAN SERTA MEMPERLUAS SEGMENT PASAR.
- ARAH KEBIJAKAN 3 : PEMANTAPAN DAYA TARIK WISATA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK DALAM MENARIK KUNJUNGAN ULANG WISATAWAN DAN SEGMENT PASAR YANG LEBIH LUAS; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 4: PELAKSANAAN REVITALISASI DAYA TARIK WISATA DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS, KEBERLANJUTAN DAN DAYA SAING PRODUK DAN KSPK.

INDIKASI PROGRAM Perintisan Pengembangan Daya Tarik Wisata di masing-masing KSPK meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM 2019-2025	PENANGGUNG JAWAB
1	Indikasi Program Perintisan Pengembangan Daya Tarik Wisata Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan KSPK dan Pengembangan Kota	Dinas Pariwisata Kota Kupang Yang Membedangi Destinasi
	a. Identifikasi dan Menyusun Rencana Pembangunan daya tarik Wisata, Alam, Budaya, Khusus/Buatan yang ada pada masing-masing KSPK b. Meningkatkan Koordinasi lintas sektor dan membangun sarana prasarana pada KSPK yang belum berkembang c. Fasilitas Pengembangan jejaring manajemen terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang disekitar lokasi baik karakteristik Lokal, Regional atau Nasional	

1/2

2.	Indikasi Program Pembangunan Daya Tarik Wisata Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Produk Dalam Menarik Minat Dan Loyalitas Wisatawan Serta Memperluas Segmen Pasar	
	a. Pengembangan Inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong percepatan pengembangan daya tarik wisata di masing-masing KSPP b. Mendorong upaya pelestarian terhadap SDA <i>Kepariwisataan dan lingkungan spesifik</i> (Bentang Alam, Bentang Laut dan Budaya) disekitar lokasi daya tarik wisata di masing-masing KSPP	
3.	Indikasi Program Pemantapan Daya Tarik Wisata Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Dalam Menarik Kunjungan Ulang Wisatawan Dan Segmen Pasar Yang Lebih Luas	
	a. Mengembangkan Inovasi produk dalam upaya meningkatkan daya tarik, Keunggulan, Kompetitif dan Komperatif serta daya saing daya tarik Wisata Alam, Budaya, Khusus/Buatan yang sedang berkembang di masing-masing KSPP b. Mengembangkan Jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait disekitar lokasi dalam konteks Regional maupun Nasional dan Internasional c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan disekitar lokasi daya tarik wisata di masing-masing KSPP d. Pengembangan daya tarik khusus dan rentang aktivitas wisata dalam berbagai skala (Hard – Soft Attration) pada manajemen atraksi daya tarik Wisata Alam, Budaya, Buatan/Khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (Mass Market) Pada Masing-masing KSPP sesuai kebutuhan pasar e. Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai Tema disekitar lokasi daya tarik wisata utama serta jejaring	

	manajemen kunjungan	
	f. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas kegiatan keparawisataaan disekitar lokasi daya tarik wisata	
4	Indikasi Program Pelaksanaan Revitalisasi Daya Tarik Wisata Dalam Upaya Peningkatan Kualitas, Keberlanjutan Dan Daya Saing Produk Dan KSPK	
	a. Inovasi manajemen atraksi dengan pengembangan tema, event khusus yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan b. Pengembangan program-program Interpretasi termasuk yang berbasis teknologi c. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung disekitar lokasi dan konteks Lokal, Regional, Nasional dan Internasional d. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataaan e. Peningkatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataaan dan lingkungan spesifik (Bentang Alam, Bentang Laut/Perairan, Bentang Budaya) disekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPK f. Pengawasan pembangunan Sumber Daya Kepariwisataaan dan Lingkungan spesifik diloksi daya wisata masing-masing	

W

3. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1. : PENGEMBANGAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA DALAM Mendukung PERINTISAN PENGEMBANGAN DPK;

ARAH KEBIJAKAN 2. : PENINGKATAN PRASARANA UMUM, KUALITAS FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA YANG Mendukung PERTUMBUHAN, MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING DPK;

ARAH KEBIJAKAN 3. : PENGENDALIAN PRASARANA UMUM, PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA BAGI DESTINASI-DESTINASI PARIWISATA YANG SUDAH MELAMPAUI AMBANG BATAS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPING LINGKUNGAN.

INDIKASI PROGRAM Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM 2019-2025	PENANGGUNG JAWAB
1	Indikasi Program Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Dalam Mendukung Pengembangan DPK	Dinas Pariwisata Kota Kupang Yang Membidangi Destinasi
	Fasilitas penyediaan lahan untuk pengembangan sarana industri pariwisata dengan nilai kompetitif.	
2.	Indikasi program peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK	
	a. Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, system pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor b. Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata c. Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata d. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi	

	antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata e. Mendorong proses desentralisasi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata f. Mendorong desentralisasi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata oleh pemerintah provinsi pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang	
3.	Indikasi program pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan	
	a. Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi pariwisata b. Fasilitas perintisan pembangunan jaringan air bersih di destinasi pariwisata c. Fasilitas pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi pariwisata d. Fasilitas penyediaan dan pengembangan pusat informasi pariwisata di destinasi pariwisata e. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop) di destinasi pariwisata f. Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di destinasi pariwisata g. Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan (early warning sytem) di destinasi pariwisata h. Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di destinasi pariwisata i. Penyediaan outlet e-Tourism kios di destinasi pariwisata j. Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di destinasi pariwisata k. Penyediaan fasilitas olah raga di destinasi pariwisata l. Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di destinasi pariwisata m. Penyediaan fasilitas pedestrian di destinasi pariwisata n. Penyediaan sarana penitipan/penitipan barang (public locker) di destinasi pariwisata o. Penyediaan fasilitas parkir di destinasi pariwisata p. Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan	

	teknologi informasi di destinasi pariwisata	
	q. Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan	
	r. Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan terkait keberlangsungan daya dukung lingkungan pada setiap destinasi pariwisata	

12

4. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PENGEMBANGAN JARINGAN INFORMASI
ARAH KEBIJAKAN 2 : PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BAGI
PENYANDANG DISABILITAS;
ARAH KEBIJAKAN 3 : PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PARIWISATA.

INDIKASI PROGRAM Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM 2019-2025	PENANGGUNG JAWAB
1	Indikasi Program Pengembangan Jaringan Informasi	Dinas Pariwisata Kota Kupang Yang Membidangi Destinasi
	Pengembangan jaringan informasi dengan kriteria: 1). mempunyai daya jangkau yang luas 2). muatan materi yang lengkap 3). terhubung dengan berbagai penyedia layanan pariwisata lain.	
2.	Indikasi Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas	
	Pengembangan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dengan kriteria sesuai dengan standar teknis bagi penyandang disabilitas	
3.	Indikasi Program Pengembangan Transportasi Pariwisata	
	a. Peningkatan ketersediaan moda sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di masing-masing DPP, KPPP dan KSPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar. b. Peningkatan reliabilitas, waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di sepanjang koridor pariwisata utama di DPK c. Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar. d. Pengembangan sistem transportasi.	

5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS
- ARAH KEBIJAKAN 2 : PENINGKATAN INDUSTRI EKONOMI KREATIF MASYARAKAT.
- ARAH KEBIJAKAN 3 : PENINGKATAN KAPASITAS DAN KESADARAN WISATA;
- ARAH KEBIJAKAN 4 : OPTIMALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;

INDIKASI PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM 2019-2025	PENANGGUNG JAWAB
1	Indikasi Program peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas	Dinas Pariwisata Kota Kupang Yang Membidangi Destinasi
	a. Pengembangan jejaring potensi wisata perkotaan dengan komunitas terkait dalam kerangka program PNPM Mandiri Pariwisata. b. Intensifikasi dan ekstensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (community marketing), melalui : - Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, bulletin organisasi, dan lain-lain) - Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komuniatas hobi, dan lain-lain)	
2.	Indikasi Program peningkatan industry ekonomi kreatif masyarakat	
	a. Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan IKM di bidang pariwisata	

	b. Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan industri pariwisata skala UMKM c. Pengembangan regulasi untuk mendukung kemudahan akses pasar terhadap produk lokal. d. Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal. e. Penetapan klasifikasi jenis dan skala, IKM dan UMKM di bidang pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal disekitar destinasi pariwisata.	
3.	indikasi program peningkatan kapasitas dan kesadaran wisata	
	a. Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di Destinasi-Destinasi Pariwisata. b. Peningkatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di Kota. c. Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar destinasi pariwisata. d. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata). e. Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata. f. Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan sadar wisata dan sapta pesona. g. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan Eksploitasi Seksual Anak di destinasi pariwisata. h. Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata. i. Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan,	

	gangguan ketertiban dan bencana). j. Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata. k. Peningkatan pemanfaatan Media Cetak, Elektronik dan Public Figure dalam pengembangan Sadar Wisata. l. Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa nasional baik cetak maupun elektronik tentang sadar wisata. m. Peningkatan pemanfaatan Media Kesenian Tradisional sebagai sarana pendukung pengembangan sadar wisata.	
4	Indikasi Program optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan	
	a. Peningkatan kapasitas pelaku industri pariwisata berbasis gender b. Pengembangan kelompok-kelompok industri kepariwisataan berbasis gender	

12

6. PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PENINGKATAN KEMUDAHAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA;

ARAH KEBIJAKAN 2 : PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

INDIKASI PROGRAM Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM 2019-2025	PENANGGUNG JAWAB
1	Indikasi Program peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata	Dinas Pariwisata Kota Kupang Yang Membedangi Destinasi
	a. Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata b. Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata. c. Penyediaan informasi profil investasi di destinasi pariwisata d. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sector pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	
2.	Indikasi Program peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata	
	a. Pengembangan secretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata b. Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari destinasi-destinasi pariwisata c. Promosi investasi sector pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet d. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan. e. Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata di	

	Indonesia	
	f. Peningkatan Road Show promosi investasi sector pariwisata ke Negara-negara potensial	
	g. Peningkatan kerjasama lintas sector terkait promosi investasi	

W

Bagian - B

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

AREA KEBIJAKAN 1 : PENGEMBANGAN PASAR WISATAWAN

AREA KEBIJAKAN 2 : PENGEMBANGAN CITRA PARIWISATA

AREA KEBIJAKAN 3 : PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA; DAN

AREA KEBIJAKAN 4 : PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA

INDIKASI PROGRAM Pengembangan Pasar Wisatawan meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM 2019-2025	PENANGGUNG JAWAB
1	indikasi program pengembangan pasar wisatawan	Dinas Pariwisata Kota Kupang Yang Membidangi Pemasaran
	a. Pengembangan Kelompok Pasar Wisata massal dari segmen wisatawan nusantara dan mancanegara seperti wisata religi antar gereja b. Pengembangan kelompok pasar minat khusus seperti intensifikasi dan modifikasi tenun etnis NTT dengan segmen wisatawan nusantara dan manca negara	
2.	Indikasi Program pengembangan citra pariwisata	
	a. Penguatan citra pariwisata Kota Kupang berdasarkan kekuatan utama yang meliputi nilai spiritualitas, keanekaragaman alam dan budaya melalui berbagai event dan media b. Peningkatan kualitas websites pariwisata Kota Kupang	
3.	indikasi program pengembangan kemitraan pariwisata	
	a. Implementasi promosi wisata bermitra (co-Marketing) dengan pelaku industri pariwisata b. Pengembangan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah dan penerima manfaat	

4	Indikasi Program pengembangan promosi pariwisata	
	a. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan b. Mempromosikan produk-produk minat khusus dengan portal khusus di website	

bx

Bagian - C
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

AREA KEBIJAKAN 1 : PENINGKATAN KUALITAS INDUSTRI PARIWISATA;

AREA KEBIJAKAN 2 : PENGUATAN REGULASI UNTUK PENGEMBANGAN
INDUSTRI PARIWISATA;

AREA KEBIJAKAN 3 : PENGUATAN SISTEM INDUSTRI PARIWISATA; DAN

AREA KEBIJAKAN 4 : PENGUATAN KEMITRAAN INDUSTRI PARIWISATA.

INDIKASI PROGRAM Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM 2019-2025	PENANGGUNG JAWAB
1	Indikasi program peningkatan kualitas industri pariwisata	Dinas Pariwisata Kota Kupang Yang Membidangi Industri
	a. Penyediaan Kemudahan dan Keringanan Prosedur Investasi di Bidang Kepariwisataan b. Peningkatan Kualitas dan Profesionalitas Jasa Pemandu Wisata c. Pemantauan dan Evaluasi Pemasaran Pariwisata	
2.	Indikasi program penguatan regulasi untuk pengembangan industri pariwisata	
	a. Penyediaan Perda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan b. Penyediaan Peraturan Walikota Kupang di Bidang pembangunan Kepariwisataan c. Penegakan Aturan Implementasi AMDAL/UKL-UPL untuk industri Pariwisata d. Penegakan Regulasi untuk Keamanan, Kenyamanan dan Keselamatan Layanan Transportasi Pariwisata	

lm

3.	Indikasi program penguatan sistem industri pariwisata	
	a. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata b. Fasilitasi Pengembangan Sapta Pesona	
4	Indikasi program penguatan kemitraan industri pariwisata	
	a. Penguatan dan Pengembangan data Base Pariwisata b. Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM dan Profesionalitas di Bidang Kepariwisata c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat d. Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Perhotelan e. Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi industri Jasa Karaoke f. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Ijin industri g. Pelembagaan industri Jasa Pariwisata h. Temu Karya Pemangku Masyarakat i. Fasilitasi Sertifikasi Higienis Produk Makanan dan Minuman j. Fasilitasi Pemberian Insentif bagi Pelaku industri yang Mengembangkan Kekhasan Lokal k. Pengembangan Jalur Transportasi yang Terkoneksi antar Destinasi Wisata l. Peningkatan Kualitas Pelaku industri dalam Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Produk Pariwisata m. Monitoring dan Pembinaan	

la

Bagian - D

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
LINGKUP PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN 1. : Penguatan Organisasi Kepariwisata;

ARAH KEBIJAKAN 2. : Pembangunan SDM Pariwisata; dan

ARAH KEBIJAKAN 3. : Penyelenggaraan Penelitian dan
Pengembangan

1. Penguatan Organisasi Kepariwisata

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : Reformasi Birokrasi Kelembagaan dan Penguatan Mekanisme Kinerja Organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;

ARAH KEBIJAKAN 2. : Peningkatan dan Pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah dan nasional;

ARAH KEBIJAKAN 3. : Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang pemasaran pariwisata;

ARAH KEBIJAKAN 4. : Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang industri pariwisata; dan

ARAH KEBIJAKAN 5 : Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang destinasi pariwisata

INDIKASI PROGRAM Penguatan Organisasi Kepariwisata meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM 2019-2025	PENANGGUNG JAWAB
1	Indikasi program reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah	Dinas Pariwisata Kota Kupang
	a. Pemantapan struktur dan personil dalam organisasi dinas untuk meningkatkan kinerja kelembagaan b. Peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan dan	

	pengawasan industri dan kegiatan kepariwisataan. c. Pengembangan sistem koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi industri dan kegiatan pariwisata lintas sector	
2.	Indikasi program peningkatan dan pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah dan nasional	
	a. Peningkatan koordinasi pelayanan antar lembaga terkait dengan kunjungan wisatawan ke kota Kupang (keimigrasian, perhubungan, industri, perdagangan, keamanan, komunikasi dan informasi). b. Peningkatan koordinasi antarmata rantai industri kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi pariwisata. c. Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis. d. Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan secara sinergis	
3.	Indikasi program pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata	
	a. Pemantapan struktur dan fungsi bidang pemasaran pariwisata pada aras SKPD untuk memantapkan pemasaran pariwisata serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan pasar pariwisata b. Mendorong pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Kupang dan meningkatkan kinerja dibidang pemasaran pariwisata NTT c. Penguatan program kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam pembangunan kepariwisataan Kota.	
4	Indikasi program pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata	
	a. Pemantapan struktur dan fungsi bidang industri pariwisata pada aras SKPD untuk memantapkan pertumbuhan industri pariwisata serta pelaksanaan penelitian	

	dan pengembangan industri pariwisata b. Mendorong Pembentukan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) di Kota Kupang dalam mengembangkan industri pariwisata di Kota Kupang c. Pengembangan Koordinasi – integrasi – sinergi GIPI Kota dan Pemerintah Provinsi, serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan industri kepariwisataan di Kota.	
5	Indikasi program pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata	
	d. Fasilitasi perintisan pengembangan destinasi pariwisata berdasarkan konsep Destination Management Organization (DMO) untuk mendorong pengembangan destinasi pariwisata Kota e. Pengembangan mekanisme koordinasi – integrasi – sinergi Destination Management Organization (DMO) dan Pemerintah Kota dengan Pemerintah Prov/Kota serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan di kota f. Fasilitasi peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional	

me

2. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPARIWISATAAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PEMBANGUNAN KUALITAS SDM PARIWISATA
DI TINGKAT PEMERINTAH KOTA; DAN

ARAH KEBIJAKAN 2 : PEMBANGUNAN KUALITAS SDM PARIWISATA
DI DUNIA INDUSTRI DAN MASYARAKAT.

**INDIKASI PROGRAM Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kepariwisataan meliputi:**

NO	INDIKASI PROGRAM 2019-2025	PENANGGUNG JAWAB
1	Indikasi program PEMBANGUNAN KUALITAS SDM PARIWISATA DI TINGKAT PEMERINTAH KOTA	Dinas Pariwisata Kota Kupang
	a. Peningkatan kemampuan perencanaan strategik (strategic planning) dan keahlian teknis bidang kepariwisataan bagi pejabat pemerintahan Kota b. Peningkatan kapasitas ASN pemerintah Kota pada semua eselon melalui: 1) Program technical expert (outsourcing SDM) 2) Magang (Apprenticeship); dan 3) Benchmarking terhadap best practices intourism untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan. c. Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui: 1) Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja; 2) Peningkatan kualitas penilai kinerja; dan 3) Implementasi sistem penilaian kinerja. d. Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (corporate culture) untuk PNS bidang kepariwisataan. e. Pemetaan kompetensi, standardisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan pada instansi yang memiliki urusan (desk) dengan pariwisata. f. Pengembangan standar kompetensi SDM pengelola <i>e-government</i> kepariwisataan yang berstandar internasional. g. Peningkatan kualitas Lembaga pendidikan dan pelatihan Kepariwisataan melalui:	

	a. peningkatan relevansi kurikulum; b. inovasi metode pembelajaran; dan c. pemutakhiran sarana prasarana pembelajaran. h. Peningkatan kualitas Widyaiswara (Trainers) melalui: a. Pengembangan kemampuan widyaiswara dalam mentransfer pengetahuan tentang Kepariwisata; dan b. Magang (On the job training). i. Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kepariwisataan melalui : a. <i>Penguasaan manajemen</i> penyelenggaraan pelatihan dengan mendatangkan Technical Expert dari lembaga pariwisata ternama di dunia; dan b. Magang di lembaga diklat kepariwisataan ternama di dunia.	
2.	Indikasi program PEMBANGUNAN KUALITAS SDM PARIWISATA DI DUNIA INDUSTRI DAN MASYARAKAT	
	a. Pemetaan jenis kompetensi faktual dan prospektif bagi SDM industri pariwisata dan penyelenggaraan pendidikan kompetensi bagi SDM industri pariwisata b. Implementasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata c. Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata melalui: a. Pengembangan pendidikan/pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata b. Pelatihan softskills (PR-ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, hospitality, courtesy); c. Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran; dan d. Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif. d. Sosialisasi penerapan Undang-Undang yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi industri pariwisata e. Pengembangan Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata.	

12

3. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA;

ARAH KEBIJAKAN 2 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA;

ARAH KEBIJAKAN 3 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA; DAN

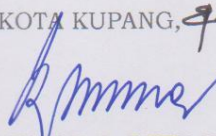
ARAH KEBIJAKAN 4 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

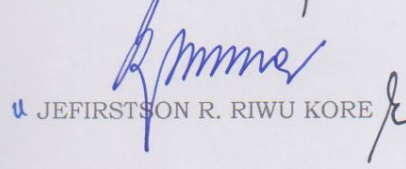
INDIKASI PROGRAM Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata
meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM 2019-2025	PENANGGUNG JAWAB
1	Indikasi program peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata Kota Kupang
	a. Pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata Kota dan pengembangan Kota; b. Pengembangan penelitian tentang pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada c. Pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata Kota	
2.	Indikasi program peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata	
	a. Pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal (mass market) dan pengembangan segmen ceruk pasar (niche market) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata Kota	

	b. Pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra KOTA KUPANG secara berkelanjutan citra pariwisata nasional (national branding) maupun citra pariwisata destinasi (destination branding); c. Pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing d. pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (stakeholders) pariwisata Kota;	
3.	Indikasi program peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata	
	a. Pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata b. pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata; c. Pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata; d. Pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas e. Pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia industri, dan masyarakat f. Pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan industri pariwisata yang kredibel dan berkualitas g. Pengembangan penelitian tentang manajemen industri pariwisata yang mengacu kepada prinsip – prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau (green economy)	
4	Indikasi program peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan	
	a. Pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Kota;	

	b. Pengembangan penelitian tentang memantapkan peran pariwisata sebagai <i>pilar strategis pembangunan Kota</i>; c. Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; d. Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Kota e. Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia industri dan masyarakat	
--	---	--

WALIKOTA KUPANG, 

 JEFIRSTSON R. RIWU KORE

	b. Pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra KOTA KUPANG secara berkelanjutan citra pariwisata nasional (national branding) maupun citra pariwisata destinasi (destination branding); c. Pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing d. pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (stakeholders) pariwisata Kota;	
3.	Indikasi program peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata	
	a. Pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata b. pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata; c. Pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata; d. Pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas e. Pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia industri, dan masyarakat f. Pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan industri pariwisata yang kredibel dan berkualitas g. Pengembangan penelitian tentang manajemen industri pariwisata yang mengacu kepada prinsip – prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau (green economy)	
4	Indikasi program peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan	
	a. Pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Kota;	